

The Role of the Social Service in Reducing Poverty in West Pasaman Regency

Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat

Weni Puji Hastuti^{*1}, Jufrizel², Siti Nur Fiza³

^{1,3}Program Studi Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Program Studi Teknik Elektro, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

*Corresponding author's e-mail: weni.puji.hastuti@uin-suska.ac.id

Abstract

Poverty remains one of the major social issues that continues to receive significant attention from the government, including in West Pasaman Regency, where poverty rates have fluctuated over the years. The Social Service Office, as the implementing agency for social affairs, plays a crucial role in poverty alleviation through various programs, policies, and social services. This study aims to analyze the role of the Social Service Office in reducing poverty rates and to identify the inhibiting factors encountered in its implementation. This research employs a qualitative method with data collected through observations, interviews, and documentation. The findings indicate that the Social Service Office has carried out the four main governmental roles proposed by Arif (2012), namely as a regulator, dynamist, facilitator, and catalyst. The institution implements several social assistance programs such as PKH, BPNT, and PBI-JK, conducts community empowerment initiatives, updates the Integrated Social Welfare Data (DTKS), and provides various welfare services. However, several obstacles are still encountered, including limited budget allocation, inaccurate beneficiary data, insufficient human resources, and challenges in cross-sector coordination. Therefore, optimizing the role of the Social Service Office is essential through improving data accuracy, strengthening collaboration, and ensuring adequate resources to sustainably reduce poverty rates in West Pasaman Regency.

Keywords: Role of Social Services, Poverty, Poverty Alleviation, Social Programs.

Abstrak

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang terus menjadi perhatian pemerintah, termasuk di Kabupaten Pasaman Barat, yang menunjukkan fluktuasi angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Dinas Sosial sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program, kebijakan, dan layanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah menjalankan empat peran utama pemerintah daerah menurut Arif (2012), yaitu sebagai regulator, dinamisor, fasilitator, dan katalisator. Dinas Sosial melaksanakan program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan PBI-JK, pemberdayaan masyarakat, pemutakhiran DTKS, serta layanan kesejahteraan sosial lainnya. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan anggaran, ketidaktepatan data sasaran, kurangnya sumber daya manusia, serta kendala koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, optimalisasi peran Dinas Sosial sangat diperlukan melalui peningkatan kualitas data, penguatan kolaborasi, serta penyediaan sumber daya yang memadai guna menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat.

Kata Kunci: Peran Dinas Sosial, Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Program Sosial.

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan merupakan problem yang mendapat perhatian khusus serta menjadi skala prioritas bagi pemerintah untuk segera ditangani. Seiring meningkatnya angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat rumit sehingga pemerintah hampir tidak mampu mengatasi kemiskinan, akan tetapi setiap pemerintah berusaha menanggulangi permasalahan kemiskinan tersebut dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya (Pratiwi et al., 2022). Permasalah sosial artinya persoalan spesifik yang dihadapi individu atau rakyat yaitu persoalan kemiskinan (Arista & Rahmah, 2025).

Kemiskinan terjadi karena beberapa faktor, bukan hanya karena faktor ekonomi, seperti masalah pendapatan, tetapi meliputi faktor sosial, antara lain pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan ketahanan pangan. Kemiskinan merupakan masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian dunia. Langkah nyata saat ini adalah menyepakati asumsi dan kriteria kemiskinan serta melakukan perbaikan database kemiskinan agar tercipta persamaan persepsi dan konsep tentang kemiskinan secara universal (Rahmatika et al., 2024).

Kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap minimal dan standar hidup tertentu. Akibat dari kemiskinan ini telah membatasi hak rakyat untuk mendapatkan kualitas Pendidikan yang baik, mendapatkan pekerjaan yang memadai, mengakses kesehatan kurang terjamin. Kemiskinan juga menjadi alasan rendahnya indeks pembangunan di Indonesia. Dengan begitu pemerintah harus dapat menjamin bahwa semua warga negara berhak mendapat kebutuhan tersebut serta menjamin kesejahteraan hidup mereka.

Secara umum, konsep kemiskinan dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dialami oleh kelompok masyarakat yang berada di bawah *Garis Kemiskinan Daerah (GKD)*, artinya mereka belum mampu memenuhi kebutuhan minimum seperti sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan (Ajizah & Nizar, 2017). Artinya kelompok masyarakat tersebut belum mampu memenuhi standar kebutuhan minimumnya yaitu sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan. Untuk kemiskinan relatif diukur berdasarkan 2 pendekatan antara lain pendekatan moneter dan non moneter. Kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan oleh masyarakat setempat sehingga proses penentuannya sangat subjektif.

Pemerintah Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga negaranya, terutama melalui jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan sektor kunci dari negara kesejahteraan berdasarkan prinsip bahwa negara harus berusaha menjamin terdapatnya jaring pengaman pendapatan bagi mereka yang tidak memiliki sumber untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 29 huruf C tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 29 huruf C menegaskan bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota yaitu

memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial (Heryanti, 2019).

Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan rakyatnya. Upaya ini juga dilakukan pemerintah dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera serta sebagai bukti keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Berbagai langkah strategis pemerintah daerah untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan tersebut melalui pelaksanaan program/kegiatan secara terintegrasi antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat (Michele et al., 2020).

Penanggulangan angka kemiskinan merupakan hal penting yang harus segera dilakukan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan bahwa kemiskinan akan menimbulkan masalah-masalah lainnya seperti kejahatan, penyakit, dan penjajahan dari bangsa lain. Seperti halnya kasus pencurian yang terjadi hampir di setiap daerah termasuk di Kabupaten Pasaman Barat, salah satu alasan utama yang menjadi penyebab tindak kriminal ini yaitu ketidakmampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah kebutuhan hidupnya. Menurut Klassen, yang dikutip dalam (Makmur et al., 2023) penurunan tingkat kemiskinan sangat bergantung pada tingkat pendapatan rata-rata, tingkat ketimpangan dasar, dan tingkat perubahan ketimpangan. Selain itu, Dollar dan Kray menyatakan bahwa pengurangan kemiskinan akan terjadi lebih cepat di negara-negara di mana pendapatan rata-rata meningkat dengan cepat dan tingkat ketimpangan lebih rendah. Kemiskinan terus berkembang seiring berjalannya waktu, dan ia sendiri mengalami perubahan bentuk yang menuju perbaikan.

Data BPS Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berfluktuasi dari 7,14% pada 2019 menjadi 7,00% pada 2024, dengan lonjakan pada 2021 akibat pandemi COVID-19. Kondisi ini menegaskan bahwa kemiskinan masih dipengaruhi berbagai faktor sosial dan ekonomi sehingga membutuhkan upaya penanganan yang berkelanjutan. Dinas Sosial sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat memiliki peran penting dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan, yang keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, serta manajemen yang efektif. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan sosial merupakan tanggung jawab wajib pemerintah daerah untuk memastikan pelayanan yang lebih dekat, cepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong pemberdayaan, pemerataan, keadilan sosial, dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan otonomi daerah (Prabowo & Rafli, 2020).

Untuk memastikan ketepatan sasaran program perlindungan sosial, pemerintah menerapkan Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang DTKS sebagai dasar penetapan penerima manfaat berbagai program kesejahteraan. Di Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Sosial berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan melalui program-program yang dikoordinasikannya. Data enam tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga miskin terus meningkat dari 43.045 KK pada 2019 menjadi 64.688 KK pada 2024, dengan lonjakan terbesar pada 2021 akibat dampak pandemi COVID-19. Kecamatan Kinali dan Pasaman tercatat memiliki jumlah

rumah tangga miskin tertinggi, sedangkan Sasak Ranah Pasisie dan Gunung Tuleh memiliki jumlah terendah. Variasi ini menunjukkan ketimpangan kondisi ekonomi antar kecamatan dan perlunya intervensi yang lebih tepat sasaran.

Pada penanggulangan kemiskinan, melalui dana dekonsentrasi Kementerian Sosial telah mendistribusikan program dan anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan. Melalui penguatan program dan anggaran ini diharapkan kinerja pemerintah daerah akan lebih optimal. Penduduk miskin dapat diturunkan populasinya dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, program yang didistribusikan dari pusat sifatnya pendukung dan tidak mengambil peranan lebih besar. Daerahlah yang mestinya memiliki alokasi yang lebih besar dalam program penanggulangan kemiskinan. Sebagaimana dikemukakan oleh (Darmi & Mujtahid, 2020), sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka masalah penanggulangan kemiskinan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah pusat. Dengan kata lain, upaya menanggulangi masalah kemiskinan sudah menjadi isu regional, yakni tergantung intervensi pemerintah daerah. Isu kemiskinan harus menjadi agenda pokok bagi pemerintah daerah.

Kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat merupakan persoalan yang telah berlangsung lama dan menjadi perhatian penting pemerintah daerah. Meskipun angka kemiskinan tidak mengalami perubahan yang signifikan setiap tahunnya, kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Data penerima bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan PBI periode 2020-2024 menunjukkan pola fluktuatif yang mencerminkan dinamika kesejahteraan masyarakat. Jumlah KPM PKH berkisar antara 16.782 hingga 18.970, sementara penerima BPNT dan PBI juga mengalami naik turun akibat perubahan data DTKS, kondisi ekonomi, serta proses validasi program. Kecamatan Kinali, Pasaman, dan Lembah Melintang tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penerima bantuan terbesar, sedangkan Sasak Ranah Pasisie dan Luhak Nan Duo memiliki jumlah terendah.

Fluktuasi ini menegaskan bahwa permasalahan kemiskinan di Pasaman Barat masih cukup signifikan dan membutuhkan intervensi yang tepat sasaran. Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam penanggulangan kemiskinan melalui fungsi sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Berbagai program telah dijalankan, seperti peningkatan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat adat terpencil, kerja sama dengan LSM, serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Namun, optimalisasi peran ini tetap diperlukan untuk mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat dalam menanggulangi angka kemiskinan serta mengidentifikasi berbagai faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam peran Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat dalam penanggulangan kemiskinan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat

dan staf Dinas Sosial, pendamping sosial, serta penerima manfaat, yang dilengkapi dengan observasi lapangan dan studi dokumentasi terhadap laporan resmi, data BPS, dan DTKS. Seluruh data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi dan peran Dinas Sosial secara objektif dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala menurut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Pemerintah sebagai regulator berperan penting dalam menciptakan sistem yang tertib, adil, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Melalui peraturan dan kebijakan yang tepat, pemerintah bisa mencegah ketimpangan, menjaga stabilitas nasional, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Peran Dinas Sosial dalam membuat kebijakan sangat strategis, karena menyangkut langsung pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Mereka bukan hanya pelaksana, tetapi juga inisiator, fasilitator, dan pengawal kebijakan sosial. Dinas Sosial bertugas melakukan pemetaan terhadap berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, disabilitas, lansia terlanjar, korban kekerasan, dan sebagainya. Melalui data seperti DTKS, P3KE, dan e-PPGBM, Dinas Sosial mendapatkan gambaran konkret untuk dasar perumusan kebijakan. Dinas Sosial menyusun kebijakan dalam bentuk program kerja, rekomendasi teknis, serta kontribusi dalam pembentukan Perda atau Perkada di bidang sosial. Dinas Sosial bekerja sama dengan OPD lain, sektor swasta, dan organisasi masyarakat untuk mendukung implementasi kebijakan yang komprehensif. Setiap program dan kebijakan yang telah dilaksanakan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan dampaknya terhadap masyarakat.

Peran Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi keluarga miskin dan rentan. Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut hambatan sosial, budaya, akses pendidikan, kesehatan, serta ketersediaan peluang ekonomi yang merata antarwilayah. Karena itu, Dinas Sosial di tingkat daerah memegang peranan yang sangat strategis dalam memastikan bahwa berbagai bentuk intervensi, baik berupa perlindungan sosial, jaring pengaman sosial, maupun pemberdayaan masyarakat, dapat terlaksana secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Peran ini dijalankan melalui berbagai fungsi utama yang telah diatur dalam kebijakan nasional maupun teori administrasi publik, termasuk teori Arif (2012) yang menekankan empat fungsi pokok pemerintah daerah yaitu regulator, dinamisor, fasilitator, dan katalisator. Dalam konteks Kabupaten Pasaman Barat, seluruh fungsi ini dijalankan dalam satu rangkaian kerja yang saling melengkapi.

Sebagai regulator, Dinas Sosial berperan memastikan bahwa pelaksanaan program-program sosial berjalan sesuai aturan yang berlaku di tingkat nasional, provinsi, dan daerah. Salah satu regulasi paling penting yang menjadi dasar kerja institusi ini adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Regulasi ini menegaskan bahwa seluruh program perlindungan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional, harus mengacu pada DTKS sebagai data utama penerima manfaat. Pelaksanaan regulasi ini di lapangan dilakukan melalui verifikasi dan validasi data secara berkala, di mana Dinas Sosial bekerja sama dengan pemerintah nagari dan kecamatan melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan akurasi data sehingga keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan bisa masuk dalam daftar penerima manfaat, sementara keluarga yang sudah mampu dapat dikeluarkan melalui mekanisme graduasi. Dengan demikian, fungsi regulator tidak hanya berkutat pada penyusunan regulasi internal, tetapi juga memastikan harmonisasi kebijakan nasional dan lokal dalam konteks perlindungan sosial.

Dalam menjalankan peran sebagai dinamisator, Dinas Sosial bertugas mendorong partisipasi aktif masyarakat, khususnya keluarga miskin, agar mereka tidak hanya menjadi objek bantuan, tetapi juga menjadi subjek pembangunan. Program pemberdayaan merupakan salah satu strategi utama dalam fungsi ini. Melalui pendamping sosial PKH, Dinas Sosial melaksanakan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) secara rutin dengan berbagai materi seperti pola asuh anak, kesehatan ibu dan bayi, gizi, manajemen keuangan rumah tangga, pendidikan anak, dan perlindungan anak. Melalui kegiatan ini, keluarga penerima manfaat tidak hanya menerima bantuan finansial, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu mereka mengelola kehidupan keluarga secara lebih baik. Selain itu, Dinas Sosial juga mendorong peran serta masyarakat luas, LSM, kelompok peduli sosial, organisasi kemasyarakatan, dan relawan dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti lansia terlantar, anak terlantar, disabilitas, tuna sosial, dan warga masyarakat adat terpencil. Keterlibatan berbagai pihak ini sangat penting dalam menciptakan ekosistem dukungan sosial yang kuat bagi kelompok rentan, terutama di wilayah yang jauh dari pusat layanan.

Peran sebagai fasilitator ditunjukkan melalui penyediaan akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu program unggulan yang berjalan di Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan data tahun 2020–2024, jumlah KPM PKH mengalami fluktuasi dalam kisaran 16.782 hingga 18.970 keluarga. Fluktuasi ini menunjukkan adanya pembaruan data, dinamika kondisi sosial ekonomi, serta proses graduasi mandiri bagi keluarga yang mengalami peningkatan kesejahteraan. Selain PKH, program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) juga menjadi instrumen penting dalam mendukung ketahanan pangan keluarga miskin. Penerima BPNT di Pasaman Barat meningkat tajam dari 30.139 KPM pada tahun 2020 menjadi 40.048 KPM pada 2021 sebelum menurun kembali pada tahun-tahun berikutnya.

hingga stabil di angka sekitar 30 ribu KPM pada 2024. Program ini penting untuk memastikan ketersediaan pangan bagi keluarga miskin sehingga mereka tidak mengalami kerentanan pangan yang berlebihan. Selanjutnya, program Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN juga mengalami fluktuasi dari 125.323 penerima pada 2020 menjadi puncaknya 142.268 pada 2022 sebelum menurun kembali menjadi 135.049 pada 2024. Program ini menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin sehingga mereka dapat mendapat layanan medis tanpa beban biaya. Di samping itu, Dinas Sosial juga menjalankan program penanganan PMKS yang mencakup layanan bagi lansia, anak, penyandang disabilitas, korban bencana, dan masyarakat adat terpencil. Seluruh program ini menunjukkan bahwa fungsi fasilitator Dinas Sosial berjalan dalam bentuk akses langsung terhadap layanan-layanan dasar bagi masyarakat miskin.

Sebagai katalisator, Dinas Sosial berperan mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kerja sama lintas sektor. Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja karena kemiskinan merupakan persoalan multidimensional. Dinas Sosial berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa anak-anak penerima PKH memenuhi jadwal imunisasi dan pemeriksaan kesehatan rutin. Kerja sama dengan Dinas Pendidikan diperlukan untuk memastikan kehadiran anak-anak sekolah penerima manfaat agar syarat kepesertaan PKH tetap terpenuhi. Kolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (PMD) juga penting dalam mendukung kegiatan verifikasi DTKS serta pemberdayaan masyarakat di tingkat nagari. Selain itu, koordinasi dengan dinas terkait ketenagakerjaan dan UMKM diperlukan untuk menciptakan kesempatan usaha, memberikan pelatihan keterampilan, serta memfasilitasi akses modal bagi keluarga miskin agar mereka dapat meningkatkan kapasitas ekonomi keluarganya. Peran katalisator ini membantu menciptakan lingkungan yang mendukung keluarga miskin untuk bangkit dari kondisi rentan dan mencapai kemandirian.

Meskipun Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan berbagai upaya strategis dalam menanggulangi kemiskinan, terdapat sejumlah faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas program dan pencapaian hasil yang optimal. Faktor-faktor ini berasal dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal, yang saling berkaitan dan perlu ditangani secara sistematis. Salah satu kendala terbesar adalah keterbatasan anggaran. Keterbatasan ini membuat banyak kegiatan strategis tidak dapat dijalankan secara optimal karena dana yang tersedia tidak memadai untuk mencakup seluruh kebutuhan program pemberdayaan masyarakat. Dampaknya terlihat pada terbatasnya jumlah peserta yang dapat mengikuti pelatihan keterampilan, tidak meratanya distribusi bantuan serta fasilitas pendukung, dan ketidakmampuan melaksanakan program secara berkelanjutan. Padahal, upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan intervensi yang intensif dan konsisten agar hasilnya signifikan. Penulis menilai bahwa peningkatan alokasi dana serta pencarian sumber pendanaan alternatif seperti kerja sama dengan sektor swasta atau lembaga donor sangat penting dilakukan agar program-program sosial dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan, disertai pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran sehingga manfaat yang diterima masyarakat miskin lebih maksimal.

Selain anggaran, keterbatasan fasilitas juga menjadi hambatan yang cukup besar. Dinas Sosial lebih berperan sebagai fasilitator atau perantara dibandingkan penyedia langsung sarana dan prasarana. Akibatnya, dalam banyak kasus masyarakat tidak mendapatkan akses yang cukup terhadap alat produksi, fasilitas pelatihan, atau infrastruktur penunjang lain yang mereka butuhkan untuk mengembangkan usaha. Kondisi ini menyebabkan masyarakat sulit membangun kemandirian usaha, pelatihan keterampilan tidak ditunjang dengan alat praktik yang memadai, dan kesenjangan antara kebutuhan lapangan dengan dukungan yang tersedia semakin lebar. Berdasarkan hasil wawancara, fasilitas biasanya diberikan melalui mekanisme koordinasi, bukan langsung dari Dinas Sosial, sehingga proses distribusi sering lambat atau tidak merata. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem distribusi dan peningkatan peran Dinas Sosial agar ketersediaan sarana pendukung pelatihan dan pengembangan usaha dapat dipastikan lebih baik. Upaya koordinatif harus disertai monitoring dan evaluasi yang ketat agar fasilitas benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata dalam penurunan angka kemiskinan.

Faktor lain yang juga cukup menonjol adalah munculnya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial. Beberapa masyarakat cenderung mengharapkan bantuan secara terus-menerus tanpa berupaya meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Fenomena ini terjadi karena kurangnya kesadaran akan pentingnya kemandirian ekonomi, minimnya motivasi untuk mengikuti pelatihan atau membangun usaha, serta rasa aman sebagai penerima bantuan yang membuat sebagian masyarakat enggan melakukan graduasi mandiri dari program sosial. Walaupun pendamping PKH dan TKS sudah memberikan penyuluhan dan edukasi, perubahan pola pikir masyarakat membutuhkan waktu yang panjang dan pendekatan yang berkelanjutan. Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan memerlukan strategi yang humanis, sistematis, dan jangka panjang. Pemerintah harus memastikan bahwa bantuan sosial tidak hanya menjadi alat konsumsi, tetapi berfungsi sebagai stimulus untuk membangun kapasitas ekonomi keluarga miskin sehingga mereka dapat berkembang menjadi mandiri dalam jangka waktu tertentu.

Di samping itu, masalah data dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) turut menjadi penghambat utama dalam penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran. Permasalahan seperti adanya masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam DTKS, ketidaksesuaian data dengan kondisi lapangan, serta proses pembaruan data yang lambat dan kompleks sering kali menyebabkan munculnya keluhan masyarakat. Banyak warga yang seharusnya menerima bantuan justru tidak mendapatkan haknya hanya karena tidak terakomodasi dalam data tersebut. Proses masuk ke DTKS harus melalui Wali Nagari, sehingga koordinasi antar-instansi menjadi aspek penting yang menentukan kecepatan pembaruan data. Kekurangan mekanisme pembaruan data yang optimal menyebabkan ketidaktepatan sasaran dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Penulis menilai bahwa penguatan sistem data dan koordinasi antara Dinas Sosial dan pemerintah nagari sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini. Data yang akurat dan

terkini akan membantu kelancaran program bantuan sosial sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Selain masalah data, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi hambatan yang sangat terlihat. Walaupun Dinas Sosial mendapat dukungan dari TKSK, Pendamping PKH, dan Tagana, jumlah serta kapasitas tenaga masih belum memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat yang luas dan tersebar. Kondisi ini berdampak pada pelayanan yang belum merata, pendampingan yang tidak bisa dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, serta respons terhadap keluhan masyarakat yang cenderung lambat. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Armayanti, Kabid Dinas Sosial, keberadaan TKSK dan pendamping PKH memang sangat membantu, namun keterbatasan jumlah mereka menjadi kendala serius terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Beliau menegaskan perlunya penambahan tenaga pendamping dan peningkatan kapasitas mereka agar pelayanan sosial dapat lebih optimal dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dengan SDM yang memadai, efektivitas program penanggulangan kemiskinan akan meningkat, partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan menjadi lebih baik, dan keluhan masyarakat dapat ditangani lebih cepat.

Sosialisasi program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi faktor penghambat yang tidak kalah penting. Meskipun Dinas Sosial telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan serta perangkat nagari, jangkauan sosialisasi tersebut masih terbatas dan belum merata hingga tingkat desa. Akibatnya, sebagian masyarakat belum mendapatkan informasi yang cukup terkait mekanisme pendaftaran, prosedur bantuan, maupun program pelatihan keterampilan yang disediakan. Kurangnya informasi tersebut membuat sebagian warga tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam program sosial, sehingga partisipasi masyarakat menjadi rendah dan tidak sedikit terjadi kesalahpahaman tentang prosedur penerimaan bantuan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Marwandi, salah satu penerima bantuan sosial, sosialisasi sering hanya sampai di tingkat kecamatan. Masyarakat desa kesulitan mendapatkan informasi jika tidak aktif bertanya atau mengikuti kegiatan di kecamatan. Hal ini menciptakan ketidaksamaan akses informasi yang pada akhirnya menurunkan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan. Oleh karena itu, sosialisasi perlu diperluas hingga tingkat desa dengan pendekatan komunikasi yang lebih intensif, terstruktur, dan menyeluruh, agar setiap masyarakat memiliki informasi yang jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami.

Melihat berbagai faktor penghambat tersebut, jelas bahwa upaya Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan masih perlu diperkuat melalui peningkatan anggaran, penyediaan fasilitas yang memadai, penguatan SDM, pembaruan data DTKS yang lebih cepat dan akurat, serta perluasan sosialisasi hingga tingkat desa. Perbaikan menyeluruh di setiap aspek ini sangat penting agar program-program yang telah dirancang dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut secara sistematis dan terpadu, diharapkan angka kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat dapat terus menurun dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata.

Meskipun Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan berbagai upaya strategis dalam menanggulangi kemiskinan, terdapat sejumlah faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas program dan pencapaian hasil yang optimal. Faktor-faktor ini berasal dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal, yang saling berkaitan dan perlu ditangani secara sistematis. Salah satu kendala terbesar adalah keterbatasan anggaran. Keterbatasan ini membuat banyak kegiatan strategis tidak dapat dijalankan secara optimal karena dana yang tersedia tidak memadai untuk mencakup seluruh kebutuhan program pemberdayaan masyarakat. Dampaknya terlihat pada terbatasnya jumlah peserta yang dapat mengikuti pelatihan keterampilan, tidak meratanya distribusi bantuan serta fasilitas pendukung, dan ketidakmampuan melaksanakan program secara berkelanjutan. Padahal, upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan intervensi yang intensif dan konsisten agar hasilnya signifikan. Penulis menilai bahwa peningkatan alokasi dana serta pencarian sumber pendanaan alternatif seperti kerja sama dengan sektor swasta atau lembaga donor sangat penting dilakukan agar program-program sosial dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan, disertai pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran sehingga manfaat yang diterima masyarakat miskin lebih maksimal.

Selain anggaran, keterbatasan fasilitas juga menjadi hambatan yang cukup besar. Dinas Sosial lebih berperan sebagai fasilitator atau perantara dibandingkan penyedia langsung sarana dan prasarana. Akibatnya, dalam banyak kasus masyarakat tidak mendapatkan akses yang cukup terhadap alat produksi, fasilitas pelatihan, atau infrastruktur penunjang lain yang mereka butuhkan untuk mengembangkan usaha. Kondisi ini menyebabkan masyarakat sulit membangun kemandirian usaha, pelatihan keterampilan tidak ditunjang dengan alat praktik yang memadai, dan kesenjangan antara kebutuhan lapangan dengan dukungan yang tersedia semakin lebar. Berdasarkan hasil wawancara, fasilitas biasanya diberikan melalui mekanisme koordinasi, bukan langsung dari Dinas Sosial, sehingga proses distribusi sering lambat atau tidak merata. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem distribusi dan peningkatan peran Dinas Sosial agar ketersediaan sarana pendukung pelatihan dan pengembangan usaha dapat dipastikan lebih baik. Upaya koordinatif harus disertai monitoring dan evaluasi yang ketat agar fasilitas benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata dalam penurunan angka kemiskinan.

Faktor lain yang juga cukup menonjol adalah munculnya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial. Beberapa masyarakat cenderung mengharapkan bantuan secara terus-menerus tanpa berupaya meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Fenomena ini terjadi karena kurangnya kesadaran akan pentingnya kemandirian ekonomi, minimnya motivasi untuk mengikuti pelatihan atau membangun usaha, serta rasa aman sebagai penerima bantuan yang membuat sebagian masyarakat enggan melakukan graduasi mandiri dari program sosial. Walaupun pendamping PKH dan TSKS sudah memberikan penyuluhan dan edukasi, perubahan pola pikir masyarakat membutuhkan waktu yang panjang dan pendekatan yang berkelanjutan. Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan memerlukan strategi yang humanis, sistematis, dan jangka panjang. Pemerintah harus memastikan bahwa bantuan sosial tidak hanya

menjadi alat konsumsi, tetapi berfungsi sebagai stimulus untuk membangun kapasitas ekonomi keluarga miskin sehingga mereka dapat berkembang menjadi mandiri dalam jangka waktu tertentu.

Di samping itu, masalah data dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) turut menjadi penghambat utama dalam penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran. Permasalahan seperti adanya masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam DTKS, ketidaksesuaian data dengan kondisi lapangan, serta proses pembaruan data yang lambat dan kompleks sering kali menyebabkan munculnya keluhan masyarakat. Banyak warga yang seharusnya menerima bantuan justru tidak mendapatkan haknya hanya karena tidak terakomodasi dalam data tersebut. Proses masuk ke DTKS harus melalui Wali Nagari, sehingga koordinasi antar-instansi menjadi aspek penting yang menentukan kecepatan pembaruan data. Kekurangan mekanisme pembaruan data yang optimal menyebabkan ketidaktepatan sasaran dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Penulis menilai bahwa penguatan sistem data dan koordinasi antara Dinas Sosial dan pemerintah nagari sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini. Data yang akurat dan terkini akan membantu kelancaran program bantuan sosial sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Selain masalah data, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi hambatan yang sangat terlihat. Walaupun Dinas Sosial mendapat dukungan dari TKSK, Pendamping PKH, dan Tagana, jumlah serta kapasitas tenaga masih belum memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat yang luas dan tersebar. Kondisi ini berdampak pada pelayanan yang belum merata, pendampingan yang tidak bisa dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, serta respons terhadap keluhan masyarakat yang cenderung lambat. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Armayanti, Kabid Dinas Sosial, keberadaan TKSK dan pendamping PKH memang sangat membantu, namun keterbatasan jumlah mereka menjadi kendala serius terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Beliau menegaskan perlunya penambahan tenaga pendamping dan peningkatan kapasitas mereka agar pelayanan sosial dapat lebih optimal dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dengan SDM yang memadai, efektivitas program penanggulangan kemiskinan akan meningkat, partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan menjadi lebih baik, dan keluhan masyarakat dapat ditangani lebih cepat.

Sosialisasi program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi faktor penghambat yang tidak kalah penting. Meskipun Dinas Sosial telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan serta perangkat nagari, jangkauan sosialisasi tersebut masih terbatas dan belum merata hingga tingkat desa. Akibatnya, sebagian masyarakat belum mendapatkan informasi yang cukup terkait mekanisme pendaftaran, prosedur bantuan, maupun program pelatihan keterampilan yang disediakan. Kurangnya informasi tersebut membuat sebagian warga tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam program sosial, sehingga partisipasi masyarakat menjadi rendah dan tidak sedikit terjadi kesalahpahaman tentang prosedur penerimaan bantuan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Marwandi, salah satu penerima bantuan sosial, sosialisasi sering hanya sampai di tingkat kecamatan. Masyarakat desa kesulitan mendapatkan informasi jika

tidak aktif bertanya atau mengikuti kegiatan di kecamatan. Hal ini menciptakan ketidaksamaan akses informasi yang pada akhirnya menurunkan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan. Oleh karena itu, sosialisasi perlu diperluas hingga tingkat desa dengan pendekatan komunikasi yang lebih intensif, terstruktur, dan menyeluruh, agar setiap masyarakat memiliki informasi yang jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami.

Melihat berbagai faktor penghambat tersebut, jelas bahwa upaya Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan masih perlu diperkuat melalui peningkatan anggaran, penyediaan fasilitas yang memadai, penguatan SDM, pembaruan data DTKS yang lebih cepat dan akurat, serta perluasan sosialisasi hingga tingkat desa. Perbaikan menyeluruh di setiap aspek ini sangat penting agar program-program yang telah dirancang dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut secara sistematis dan terpadu, diharapkan angka kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat dapat terus menurun dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata.

Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat telah menjalankan perannya secara komprehensif sesuai teori peran pemerintah daerah. Fungsi regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator saling melengkapi dalam menciptakan sistem penanggulangan kemiskinan yang menyeluruh. Program bantuan sosial terbukti membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar, sementara kegiatan pemberdayaan dan kerja sama lintas sektor menjadi fondasi penting bagi keluarga miskin untuk mencapai kemandirian. Namun demikian, keberhasilan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan tetap membutuhkan peningkatan koordinasi, perbaikan kualitas data, peningkatan kapasitas SDM, serta penyediaan sarana prasarana yang memadai, sehingga masyarakat miskin di Kabupaten Pasaman Barat dapat terbebas dari kemiskinan secara berkelanjutan.

PENUTUP

Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat memiliki peran penting dalam penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan dan bantuan sosial, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan anggaran, fasilitas, dan validitas data DTKS membuat penyaluran bantuan kurang optimal dan tidak sepenuhnya tepat sasaran. Jumlah serta kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai juga menghambat pendampingan di seluruh wilayah. Selain itu, ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial, serta koordinasi dan sosialisasi program yang belum merata hingga tingkat desa, menjadi tantangan tambahan. Berbagai hambatan ini menunjukkan perlunya penguatan peran dan kapasitas Dinas Sosial agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat menghasilkan dampak yang lebih efektif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Ajizah, N., & Nizar, M. (2017). *Ekonomi Mikro Makro Prespektif Islam*. Universitas Yadharta Pasuruan.
- Arista, A. J., & Rahmah, S. (2025). *Evaluasi Efektivitas Program Pembinaan Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) di Dinas Sosial Kota Pekanbaru*. Al-

- Manar Journal of Public Administration and Management*, 2(1), 68–77.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi Keempat). Pustaka Pelajar.
- Darmi, T., & Mujtahid, I. M. (2020). Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 3(1). <https://doi.org/10.31506/jipags.v3i1.5484>
- David, M. (1973). *Measuring the Condition of the World's Poor: The Physical Quality of Life Index*. Pergamon Press.
- Heryanti. (2019). Peran Dinas sosial Kabupaten Bone dalam Menanggulangi kemiskinan (Perspektif Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial). *Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law*, 2(2), 46–72. <https://doi.org/10.30863/jad.v2i2.501>
- Makmur, F. U., Mone, A., & Yusuf, M. (2023). Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Keluarga Miskin Di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 4(6), 1254–1267.
- Michele, V., Lasut, R., & Tuwaidan, H. F. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. *Lex Privatum*, 8(3), 73–92.
- Narimawati, U. (2008). *Metodologi Penelitian: Dasar Penyusunan Proposal dan Laporan Penelitian*. Agung Media.
- Prabowo, L., & Rafli, M. T. (2020). Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 20–29.
- Pratiwi, S. A., Noorsyarifa, G. C., & Apsari, N. C. (2022). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekonomi di Indonesia Melalui Perspektif Pekerja Sosial. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(1), 72–82. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.39965>
- Sugiyono. (2019). *Metodologi penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R & D*. Alfabeta.
- Rahmatika, A., Dwiyaniti, N., Huda, A. N., & Malik, A. (2024). Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Dan Ketimpangan Pangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(12), 131–144.
- Ramdani, M. (2020). Determinan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1982-2012. *Economics Development Analysis Journal*, 4(1), 58–64.